

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Informasi yang aktual, akurat, dan terpercaya merupakan komoditi utama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tidak saja tenaga profesional dan para pembuat keputusan yang membutuhkan informasi aktual, namun semua profesi dan kalangan sangat membutuhkan informasi yang aktual dan terpercaya dalam mendorong berbagai aktivitas sehari-hari. Misalnya, pedagang membutuhkan informasi indeks harga pasar, petani membutuhkan informasi mengenai keterbaruan teknologi dalam bidang pertanian, begitu juga halnya dengan profesi-profesi lainnya.

Media massa kerap kali menjadi rujukan dalam penelusuran informasi aktual. Hal tersebut disinyalir media massa memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi aktual kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tentu tidak sembarangan, keakuratan data dan sumber-sumber informasi tentu dipertanggungjawabkan oleh dewan redaksi sebelum informasi di diseminasikan kepada masyarakat. Diseminasi informasi oleh media massa kepada khalayak dapat dilakukan melalui berbagai sumber yang ada.

Penyiaran misalnya, merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang memiliki kegiatan memancarluaskan siaran kepada khalayak dengan menggunakan sarana pemancar atau disebut juga dengan transmisi yang berada di darat, laut dan udara dengan menggunakan spektrum frekuensi

radio melalui udara. Transmisi melalui signal udara, kabel dan media lainnya bertujuan agar informasi yang dipancarkan dapat diterima oleh masyarakat secara bersamaan dan serentak dengan menggunakan media penerima siaran. Berbagai informasi yang disajikan melalui jalan pemancaran tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang terkini kepada khalayak. Aktivitas penyiaran dapat dibagi dalam kategori, penyiaran audio seperti radio, dan audio visual yaitu televisi.

Dalam sebuah aktivitas siaran tidak dapat dilakukan secara langsung oleh individu secara mandiri, namun terdapat lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab terhadap aktivitas siaran yang disebut dengan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan wadah yang berperan dalam berbagai kegiatan penyiaran di masyarakat. Lembaga penyiaran sebagai wadah komunikasi massa tentu menjalankan fungsi dan peran layaknya komunikasi massa, seperti *surveillance* (pengawasan), *interpretation* (penafsiran), *lincage* (keterkaitan) *transmission of values* (penyebaran nilai), dan *entertainment* (hiburan) (Dominik, 2001).

Pada saat ini lembaga penyiaran didirikan dengan berbagai latar belakang, yang menaunginya. Hal tersebut merujuk pada organisasi dan instansi yang menaungi lembaga penyiarannya, seperti Lembaga penyiaran swasta, merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh swasta, begitu juga dengan lembaga penyiaran yang didirikan oleh pemerintah. Agar kebebasan pers yang diatur oleh Undang-undang tidak keablasan, maka semua urusan terkait dengan penyiaran baik penyiaran melalui radio, televisi, dan new media (media online) diwadahi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Radio merupakan salah satu lembaga penyiaran yang mendistribusikan informasi kepada khalayak. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjelaskan bahwa radio merupakan salah satu bentuk lembaga penyiaran, hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 3 “Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

Pada Undang-Undang tersebut sudah jelas diatur bahwa radio merupakan salah satu komunikasi massa yang berperan dalam penyebaran informasi kepada khalayak. Namun, dengan hadirnya *new media* khalayak cenderung memilih media dalam komunikasi dalam bentuk komunikasi pandang dengar. Fenomena ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun 1990 dimana radio mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Bila dilihat sepintas di lapangan, terjadi penurunan minat pendengar radio. Mendengar radio dilakukan pada saat perjalanan menuju kantor, rumah, dan tempat lainnya. Hal ini menunjukkan radio digunakan sebagai pengisi waktu luang saja. Disamping itu, beberapa segmentasi khalayak menggunakan radio untuk mendengarkan wirid pengajian, dandang *Minang*, namun dibarengi dengan aktivitas lainnya. Sehingga menengarkan radio bukanlah *prime activity* pada masyarakat sekarang ini.

Selanjutnya, menurunnya kualitas penyiar yang menjadi ujung tombak dalam distribusi informasi kepada khalayak. Menjadi penyiar radiopun pada saat ini bukanlah menjadi pekerjaan utama, pekerjaan penyiar dilakukan sebagai pekerjaan sampingan oleh banyak orang. Disamping itu, tidak jarang

profesi sebagai penyiar radio dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi penyiar televisi. Berbagai fenomena ini jika terus dibiarkan akan membuat radio terus kehilangan peminat, dan akan berdampak sistemik radio akan hilang sebagai lembaga penyiaran publik.

Banyak terdapat fenomena menarik dari setiap informasi yang disebarluaskan oleh media. Persaingan antara media dengan media lainnya, terkadang membuat setiap khalayak tidak mendapatkan informasi yang kurang tepat. Dari sudut mata memandang, beberapa dari media khususnya di Indonesia lebih mementingkan keuntungan sehingga fungsi dari media sebagai alat penyebar informasi yang layak bagi masyarakat tidak dipergunakan dengan baik. Dalam mengonsumsi informasi dari media massa, khalayak seharusnya bukan hanya menerima informasi saja tetapi harus mengerti dan memahami informasi tersebut. Untuk memahami informasi dari media, saat ini literasi media dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan perkembangan media dan tingkat kebebasan media tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkantor pusat di Jakarta merupakan komisi yang paling bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang terdapat di Indonesia. Namun, untuk menjalankan peran dan fungsinya di daerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Salah satu bidang pada Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu pengelolaan struktur dan sistem penyiaran adalah mengenai urusan perizinan pendirian lembaga penyiaran baru, industri dan bisnis penyiaran.

Rekomendasi Kelayakan Perizinan lembaga penyiaran di Provinsi Sumatera Barat akan diterbitkan oleh KPID Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini, terdapat sebanyak 38 Radio, 29 Televisi, dan 7 TV Kabel yang terdaftar di KPID Sumbar. Lembaga ini secara berkala akan mengurus perpanjangan perizinan siaran. Namun, realitas yang terdapat di lapangan masih terdapat lembaga penyiaran yang belum menjalankan sepenuhnya fungsi dari komunikasi massa, yang semestinya menjadi tugas pokok mereka dalam dalam beraktivitas sehari-harinya.

Fenomena ini merupakan sebuah indikasi terdapat keliruan dalam terhadap kebutuhan informasi khalayak. Semestinya lembaga penyiaran dapat memenuhi kebutuhan informasi khalayak yang menjadi segementasi pendengarnya. 38 Radio yang terdapat diwilayah kerja KPID Sumbar ini semestinya tetap eksis dan berkembang, jika memperhatikan kebutuhan informasi khalayaknya. Dengan demikian, perlu dikaji secara komprehensif mengenai pemahaman lembaga penyiaran terhadap kebutuhan informasi khalayak.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pemahaman lembaga penyiaran kebutuhan informasi khalayak. Untuk mengungkap realitas di lapangan, penelitian ini akan menggunakan metologi studi kasus pada lembaga penyiaran radio pada wilayah kerja KPID Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, selanjutnya penelitian ini akan menfokuskan pada permasalahan sebagai berikut. Bagaimana konstruksi kelembagaan penyiaran radio di wilayah kerja KPID Sumatera Barat dalam pemenuhan kebutuhan informasi khalayak?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapat gambaran dari fokus penelitian tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut ini.

1. Bagaimana konstruksi kelembagaan penyiaran radio di Sumatera Barat terkait fungsi komunikasi massa?
2. Bagaimana konstruksi kelembagaan penyiaran radio di Sumatera Barat terkait pemenuhan kebutuhan informasi khalayak?
3. Bagaimana pemahaman lembaga penyiaran radio di Sumatera Barat peran KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan realitas terhadap konstruksi kelembagaan penyiaran dalam pemenuhan informasi khalayak dan peran lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi komunikasi massa.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian tersebut, secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis konstruksi kelembagaan penyiaran radio di Sumatera Barat terhadap fungsi komunikasi massa.
2. Menganalisis konstruksi kelembagaan penyiaran radio di Sumatera Barat mengenai pemenuhan kebutuhan informasi khalayak.
3. Menganalisis pemahaman lembaga penyiaran radio di Sumatera Barat peran KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi sebagai berikut ini.

1. Pengembangan penelitian lebih lanjut untuk kajian yang berhubungan komunikasi institusi, khususnya komunikasi organisasi yang terjadi antara KPID dengan mitra kerja yakni, lembaga penyiaran.
2. Pengembangan keilmuan, khususnya ilmu komunikasi yang terkait pada bidang, jurnalistik, penyiaran, komunikasi organisasi, dan manajemen komunikasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan pemikiran untuk perumusan kebijakan lebih lanjut mengenai berbagai kegiatan KPID dalam sosialisasi kebijakan kepada mitra kerja, seperti lembaga

penyiaran. Beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengoptimalkan komunikasi antara institusi KPI dengan lembaga mitra kerja. Disamping itu, juga dapat menjadi kajian dalam merumuskan kebijakan terkait dengan prosedur pengurusan ijin lembaga penyiaran yang terdapat di Indonesia.
2. KIPD Sumatera Barat, dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan melakukan sosialisasi mengenai peran media massa dalam komunikasi massa.

1.5.3 Signifikansi Penelitian

Harapan dan kebutuhan masyarakat informasi saat ini menjadi tantangan bagi pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat sebagai lembaga teknis yang disebut sebagaiperpanjangan tangan mengenai kebijakan dan program-program pemerintah. Terutama dalam hal pengurusan Izin Lembaga Penyiaran

Dengan dilakukannya penelitian ini akan diperoleh data sejauh mana praktek sosialisasi yang baik diterapkan dalam pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan informasi kepada Lembaga Penyiaran. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam menyusun rencana kerja agar sesuai dengan tujuan dan khalayak yang ingin dicapai, artinya antara KPID

dan Lembaga Penyiaran berada pada posisi yang seimbang dalam hal memberi dan menerima informasi yang dibutuhkan.

